

RINGKASAN EKSEKUTIF
Environmental and Social Management Framework (ESMF)
BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes –
Jambi Sustainable Landscape Management Project
(BioCF ISFL – JSLMP)

Program Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Jambi (J-SLMP) dibangun atas komitmen Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi dari sektor hutan dan lahan. Program ini mencakup pada perencanaan dan kebijakan pertanian berkelanjutan, serta praktik penggunaan lahan yang lebih inovatif. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan dan memberi insentif atas upaya Pemerintah Indonesia mengurangi emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Jambi. JSLMP akan melengkapi rangkaian intervensi yang sudah ada dan menyediakan Pembayaran Berbasis Hasil melalui Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi (ERPA).

Pada tahap persiapan, dukungan teknis disalurkan berupa pembiayaan BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF ISFL) dari Bank Dunia. Pembiayaan tersebut mencakup dukungan dana persiapan dan pra-investasi kepada Pemerintah Indonesia guna mempersiapkan proyek peningkatan lingkungan yang memungkinkan pengurangan emisi. J-SLMP juga bertujuan untuk mengimplementasikan perbaikan lingkungan, termasuk koordinasi lintas sektoral dan menguji pendekatan penggunaan lahan untuk mengurangi emisi di Jambi. JSLMP juga mendukung pemerintah untuk mendesain program untuk penurunan emisi dan penguatan sistem untuk membangun kapasitas pemerintah untuk mengakses dan memanfaatkan insentif berbasis kinerja untuk mengurangi deforestasi, degradasi dan perubahan penggunaan lahan.

Sejalan dengan kebijakan Bank Dunia, terutama yang berkaitan dengan persyaratan untuk manajemen lingkungan dan sosial, desain *Environmental and Social Management Framework (ESMF)* menjadi dokumen operasional proyek untuk menilai dampak potensial. ESMF juga berguna untuk menyiapkan rencana manajemen lingkungan dan sosial dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan di bawah program JERR.

Intervensi program ER akan dilaksanakan di seluruh wilayah Jambi mencakup dukungan dan promosi praktik manajemen berkelanjutan untuk mengatasi pendorong emisi yang dihasilkan dari kegiatan sektoral termasuk. Di dalamnya termasuk perkebunan kayu, tanaman perkebunan, pertanian subsisten, dan praktik penebangan yang tidak berkelanjutan. Desain program mempertimbangkan distribusi hutan yang tersisa, ancaman terhadap hutan-hutan tersebut, dan para pemangku kepentingan utama yang terlibat di masing-masing wilayah.

Program ER bertujuan untuk mengatasi pendorong dan penyebab mendasar dari deforestasi, dekomposisi gambut dan degradasi vegetasi. Program ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu:

Komponen 1 Penguatan Kebijakan Dan Kelembagaan

Komponen pertama akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kurangnya kapasitas kelembagaan untuk memastikan tata kelola hutan dan lahan. Selain itu, komponen 1 ditujukan untuk peningkatan kerangka peraturan dan kelembagaan di AFOLU serta memperkuat lembaga dan instrumen untuk menegakkan kebijakan. Komponen 1 diharapkan dapat menyelesaikan penyebab mendasar terkait dengan kebijakan dan lembaga; meningkatkan tata kelola hutan dan lahan; dan membangun lingkungan yang memungkinkan untuk program ER. Komponen 1 juga mencakup mekanisme dan lembaga MAR dan BS, mencegah deforestasi, degradasi hutan, dan dekomposisi gambut. Semua upaya tersebut diupayakan melalui kerja kolaboratif antar pemangku kebijakan. Komponen ini juga diharapkan dapat mendukung persiapan kebijakan jangka panjang seperti rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Provinsi Jambi untuk mengatasi masalah dan memastikan bahwa program ER akan dikelola secara terus menerus dan menjadi isu utama dalam pembangunan Provinsi Jambi.

Komponen 2 Menerapkan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

Komponen ini akan membahas kurangnya praktik berkelanjutan dalam pengelolaan lahan, kebakaran, dan konflik tenurial, masalah yang diangkat selama konsultasi pemangku kepentingan. Isu ini relevan dengan pendorong deforestasi dan degradasi baik dari AFOLU maupun lahan gambut. Pendekatan dalam komponen ini adalah implementasi di tingkat tapak, baik oleh Kesatuan Pemangku Hutan (KPH), sektor swasta, dan oleh masyarakat. Promosi untuk praktik pengelolaan lahan berkelanjutan juga akan dilakukan. Pengembangan model pengelolaan berbasis lanskap, yang memadukan berbagai sektor, pelaku dan komoditas, diharapkan akan berdampak jangka panjang pada keberlanjutan.

Komponen 3 Manajemen Dan Koordinasi Program

Komponen ini berfokus pada manajemen keseluruhan implementasi ER, termasuk alat untuk mengimplementasikan REDD+. Antara lain mencakup pengukuran, analisis, dan pelaporan (MAR), perlindungan lingkungan dan sosial (ESMF, IPPF), dan mekanisme pembagian manfaat (BSM) termasuk manfaat non-karbon. Kemudian pada tahun kedua implementasi akan ada penguatan terhadap kelembagaan MAR, Safeguards dan BSM.

Karena Program ER sedang dilaksanakan secara paralel dengan hibah investasi J-SLMP, pengembangan ESMF ini berdasar pada instrumen perlindungan dan pengaturan kelembagaan di bawah proyek.

Peningkatan utama untuk mengatasi ketentuan *Environmental and Social Safeguard* (ESS) mencakup manajemen tenaga kerja dan kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Lebih lanjut, alokasi sumber daya tambahan, yang terdiri dari mobilisasi para ahli dan personel yang relevan, alokasi anggaran, pengembangan kapasitas, dan pengawasan, telah diusulkan karena perluasan ruang lingkup kegiatan yang termasuk dalam Program ER. Elemen ESS relevan akan mencakup konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, langkah-langkah untuk mempromosikan alokasi dan distribusi manfaat yang adil, dan penghindaran dampak buruk pada kelompok rentan. Kemudian termasuk masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan, mewakili komponen desain integral di bawah Program ER.

Karena ruang lingkup dan cakupan Program ER, yang mencakup berbagai intervensi ER di seluruh sektor Pertanian, dan Penggunaan Lahan lainnya (AFOLU), semua ESS Bank Dunia, dengan pengecualian ESS 9 tentang Perantara Keuangan, telah diterapkan. Yaitu meliputi: ESS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial; ESS 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja; ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Manajemen Polusi; ESS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat; ESS 5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela; ESS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan; ESS 7: Masyarakat Adat; ESS 8: Warisan Budaya; ESS 10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi.

Program ER mengecualikan kegiatan yang melibatkan pembebasan lahan secara paksa dan/atau dengan merancang kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk pada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLC). Kegiatan yang diklasifikasikan sebagai risiko tinggi dari perspektif lingkungan dan sosial telah dikeluarkan dari program.

Karena program ER dirancang untuk memungkinkan penggabungan kegiatan yang memenuhi syarat selama pelaksanaan Program ER, ESMF mencakup protokol untuk menyaring dan menilai potensi risiko dan dampak dari kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa mereka akan dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan ESMF. Ini termasuk kegiatan dengan pembiayaan di bawah Rencana Pembagian Manfaat Program (BSP) untuk menghasilkan pengurangan emisi lebih lanjut di bawah program yang sama.

Kegiatan berisiko tinggi tidak akan dimasukkan dalam program, dan karenanya, karbon yang dihasilkan dari kegiatan tersebut tidak akan memenuhi syarat untuk pembayaran ER. Elemen-elemen yang relevan di bawah setiap ESS yang berlaku telah dimasukkan ke dalam penyaringan risiko dan kriteria klasifikasi risiko. ESMF akan mencakup protokol verifikasi sebagai bagian dari uji tuntas lingkungan dan sosial secara berkala, di mana temuan akan dimasukkan sebagai bagian dari Laporan Pemantauan Pengurangan Emisi Program (ERMR).

ESMF ini mencakup prosedur untuk pengelolaan lingkungan dan sosial untuk implementasi dan pemantauan kegiatan komponen 1 hingga 3 yang mencakup penyaringan daftar negatif, penyaringan risiko dan dampak, kode dan praktik lingkungan, pengelolaan lingkungan dan langkah-langkah pemantauan, FGRM, ECOP, IPPF, RPF dan IPPF.